

Dua Dekade The PRAKARSA

**"Terus Melaju, menuju Indonesia Maju yang
Demokratis, Adil, Makmur dan Berkelanjutan"**



2024

Dua Dekade The PRAKARSA

"Terus Melaju, menuju Indonesia Maju yang Demokratis, Adil, Makmur dan Berkelanjutan"



2024

Dua Dekade The Prakarsa

“Terus Melaju, menuju Indonesia Maju yang Demokratis, Adil, Makmur dan Berkelanjutan”

Penyusun:

Bintang Aulia Lutfi, Farida Indriastuti

Desain dan Tata Letak:

Rohmad Aditiya Utama

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA

Komplek Rawa Bambu 1

Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, Indonesia

Disclaimer:

Catatan perjalanan dua dekade The PRAKARSA berdasarkan wawancara mendalam dengan para pihak. Disusun sebagai bagian dari laporan publik yang disampaikan pada acara “Anniversary 20th The PRAKARSA”.



Kata Pengantar

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mempersembahkan catatan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik dan refleksi atas perjalanan dua dekade The PRAKARSA. Catatan perjalanan kami disusun sebagai gift dari acara “Anniversary 20th The PRAKARSA”. Dokumen ini disusun berdasarkan wawancara mendalam dengan para pihak: pendiri, pelaksana, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya yang telah berdinamika bersama. Catatan perjalanan ini disusun juga untuk merayakan pencapaian selama dua dekade terakhir ini. Kami berharap, dengan berpegang pada pencapaian yang ada, kami dapat terus melaju, menuju Indonesia Maju yang demokratis, adil, makmur berkelanjutan. Kami optimistis dan siap melaju untuk dua puluh tahun kedua, dua puluh tahun ketiga, dua puluh tahun keempat dan dua puluh tahun seterusnya.

Selama dua puluh tahun, PRAKARSA telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan mandat untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, adil, makmur dan berkelanjutan melalui produksi dan diseminasi pengetahuan yang inovatif transformatif demi terwujudnya keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dua dekade perjalanan yang penuh lika-liku dalam advokasi kebijakan dan penguatan perumusan kebijakan publik berbasis bukti dengan pendekatan multidimensi dan multipihak merupakan sesuatu yang bermakna bagi kami di PRAKARSA.

Kami akan terus berupaya memainkan peranan sebagai wadah pemikiran dan wadah aksi yang menghubungkan suara masyarakat dengan kebijakan publik. Lembaga ini dibentuk dengan satu tujuan sederhana namun mendalam, yaitu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, mencerminkan keadilan bagi semua, terutama bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan. PRAKARSA selalu bergerak pada aras knowledge generating, engagement dan problem solving. Kami bangga telah berkontribusi lahirnya perubahan dan perbaikan kebijakan publik di berbagai bidang, khususnya pada kebijakan sosial, fiskal dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan tulus, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan dua dekade ini. Dukungan, kerja sama, saran, pujian dan kritik yang datang dari mitra kerja sangat berarti bagi kami dan sangat menentukan pencapaian ini. *Without you, we are nothing; with you, we are something; together, we are everything.* Kami terbuka untuk kerja sama dan kami terus nantikan dukungan Anda semua. Kami terbuka menerima saran-kritik dari Anda semua.

Dengan rendah hati, kami juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama dua dekade ini. Semoga ke depan kami dapat bekerja dan berkontribusi lebih baik lagi. Izinkan kami – pendiri, seluruh staff, associate, penasehat dan konsultan – merayakan pencapaian dua dekade ini. Kami bangga dan bahagia memiliki tim yang solid, cerdas, cekatan, berintegritas dan berdedikasi. Terima kasih seluruh keluarga besar PRAKARSA. *Finally*, PRAKARSA akan terus melaju dan *thank you!*

Jakarta, 19 September 2024

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	iii	
01	Menyemai Keadilan Sosial dan Kesejahteraan	1
02	Jejak Perjalanan PRAKARSA dari Masa ke Masa	2
03	Transformasi menjadi Think Tank Organik	3
04	Program Unggulan PRAKARSA	4
05	Pengaruh di Tingkat Global dan Pembangunan Berkelanjutan	5
06	Riset-Riset Unggulan PRAKARSA	6
07	Kontribusi PRAKARSA dalam Kebijakan Sosial dan Ekonomi	7
08	Dampak dan Pencapaian Signifikan PRAKARSA	8
09	Strategi Media dan Komunikasi PRAKARSA	9
10	Tantangan dan Kolaborasi Lintas Stakeholder	11
11	Harapan Para Mitra Pembangunan untuk Masa Depan PRAKARSA	12
12	Penutup	13
13	Kronik PRAKARSA Dua Dekade	15



Menyemai Keadilan Sosial dan Kesejahteraan

"The spirit of democracy is not a mechanical thing to be adjusted by abolition of forms. It requires a change of heart." - (Mahatma Gandhi)

P erkumpulan PRAKARSA lahir pada 31 Agustus 2004 silam. Kini, usianya mencapai 20 tahun, cukup matang sebagai lembaga penelitian dan advokasi kebijakan "think and do think" berbasis organisasi masyarakat sipil di Jakarta. Prakarsa telah sukses menyemai gagasan, inovasi dan memproduksi pengetahuan dalam bentuk penelitian, policy brief, policy papers dan lainnya yang menjadi rujukan penting bagi lintas sektor, yaitu organisasi masyarakat sipil, akademik hingga pemerintah selama kurun waktu 20 tahun.

PRAKARSA telah memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mempengaruhi kebijakan, melakukan advokasi dan kampanye dengan mengangkat narasi-narasi baru selama 20 tahun ini, dari kebijakan kesejahteraan, kebijakan fiskal hingga pembangunan berkelanjutan. PRAKARSA telah dipercaya dalam memproduksi pengetahuan melalui riset-riset yang bernas dengan isu-isu yang sangat strategis.

Para penggagas PRAKARSA, antara lain; Sugeng Bahagjijo, Binny Bintarti Buchori, Purnama Adil Marata, alm Bagus Giripurwo, Darmawan Triwibowo dan lainnya, terinspirasi oleh lembaga-lembaga riset global yang sangat kredibel dan berpengaruh di dunia, seperti Institute of Development Studies (IDS) di Inggris dan Center for Global Development (CGD) di Amerika Serikat. Para penggagas percaya bahwa pengaruh organisasi tidak hanya dapat dicapai melalui advokasi, tetapi juga melalui produksi dan penyebaran pengetahuan. Inilah yang menjadi dasar pendirian PRAKARSA, sebuah lembaga riset yang bertujuan untuk menghasilkan ide-ide perubahan sosial yang berakar pada pengalaman lokal.

Setelah melalui beberapa diskusi dan persiapan, lembaga think tank yang awalnya juga bertujuan untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil ini didirikan dengan nama "Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif," disingkat PRAKARSA. Organisasi ini resmi terdaftar melalui Akta Notaris Publik Nurul Larasati, SH No. 03 pada 31 Agustus 2004, dan mendapatkan legalitas dari Kementerian Kehakiman dan HAM, Republik Indonesia, setahun kemudian.

Binny Bintarti Buchori, salah satu pendiri PRAKARSA yang pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif PRAKARSA mengungkapkan, "PRAKARSA bukan lembaga think tank yang bereaksi sesaat pada kebijakan-kebijakan strategis, tetapi juga menyampaikan tema-tema jangka menengah dan jangka panjang." PRAKARSA telah membuktikan dan berkontribusi terhadap kebijakan-kebijakan alternatif yang sangat krusial di Indonesia, seperti isu-isu jaminan sosial, lansia dan lainnya.

PRAKARSA memiliki visi untuk menjadi lembaga kajian dan pengembangan kapasitas yang berstandar internasional, serta mampu melahirkan ide-ide baru yang inovatif dan transformatif dalam rangka mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan. PRAKARSA fokus pada tiga area utama yaitu kebijakan kesejahteraan, kebijakan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan. Lembaga ini percaya bahwa kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir yang dapat dicapai melalui kebijakan yang adil dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Program Manager SDGs INFID, Bona Tua P.P mengungkapkan, pentingnya PRAKARSA sebagai lembaga yang berfokus pada pengetahuan agar lebih implementatif, bukan seperti lembaga think tank akademik lainnya, "Jadi tidak langsung operasional

tapi dibentuk untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi praktis, PRAKARSA jadi rujukan penting. PRAKARSA didirikan sebagai lembaga think tank yang cikal bakalnya dari value NGO dan isunya lebih dekat dengan keseharian masyarakat tentang kemiskinan, layanan kesehatan, lansia, lingkungan dan lainnya.”



Jejak Perjalanan PRAKARSA dari Masa ke Masa

"The best way to predict the future is to create it. A successful organization is one that continually evolves, adapts, and grows with the times." - (Peter Drucker)

Pada periode awal berdirinya pada 2004 hingga 2008, PRAKARSA memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan melalui riset-riset kebijakan dan advokasi. Pada fase awal ini, PRAKARSA berfokus untuk mengisi kekosongan gagasan di kalangan organisasi masyarakat sipil dengan menghasilkan pengetahuan yang strategis dan inovatif. PRAKARSA mulai membangun epistemic community yang memperkuat jaringan dengan pemerintah, seperti Kementerian Keuangan, serta CSO yang berfokus pada isu kesehatan. Meski terdapat tantangan dalam memperluas pengaruhnya, PRAKARSA berhasil menempatkan dirinya sebagai penghasil gagasan-gagasan yang relevan bagi kebijakan publik.

Abdul Manan, Redaktur Desk Internasional TEMPO mengatakan, PRAKARSA sebagai lembaga think tank sangat penting posisinya, karena banyak menyodorkan alternatif-alternatif kebijakan melalui penelitian dan policy brief. Media seringkali menggunakan studi-studi itu, juga beragam isu-isu strategis yang disodorkan oleh PRAKARSA. Selain itu policy brief yang dihasilkan PRAKARSA dapat mengingatkan pemerintah soal pilihan kebijakan pembangunan yang berkeadilan, tanpa merugikan masyarakat sipil dan kelompok rentan lainnya. Kebijakan itu harus komprehensif— tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonominya saja, namun penting bagi PRAKARSA untuk memberikan masukan dan pandangan kritis kepada pemerintah, karena lembaga think tank memang lebih fokus pada produksi pengetahuan. “Kajian riset PRAKARSA tidak disampaikan dengan ekspresi marah-marah dalam demonstrasi, itu jauh diterima oleh pemerintah dan lintas sektor,” ujar Manan.

Komnas HAM, melalui Anis Hidayah juga memberikan masukan penting untuk PRAKARSA. Menurutnya, kajian dan advokasi yang dilakukan PRAKARSA itu menjadi jembatan masyarakat di tingkat bawah atau grass root yang selama ini tidak memiliki akses langsung untuk terkoneksi dengan pemerintah, internasional, UN dan lainnya. Program-program PRAKARSA kemudian menjembatani itu menurut Anis, “Menjadi pihak yang engaged dengan masyarakat dan pemerintah, dan memberikan perspektif ekonomi yang berpihak kepada masyarakat; ekonomi kerakyatan, social inclusion, saya kira besar sekali peranan PRAKARSA dalam hal ini.”

Anis mencatatkan, Indonesia saat ini menghadapi masa transisi demokrasi, dengan adanya pemerintahan yang baru, di banyak negara juga mengalami masa-masa krisis demokrasi, namun yang terpenting lembaga think tank seperti PRAKARSA tetap peduli dengan isu perekonomian masyarakat, perspektif masyarakat terkait bagaimana mereka hidup dalam situasi inequality yang semakin lebar. “Pembangunan yang bisa dikatakan masih berfokus pada infrastruktur, tapi belum berorientasi pada pengembangan kualitas hidup masyarakat kita, jadi ya kerja-kerja advokasi harus dilanjutkan dan lebih berpihak ke masyarakat di akar rumput,” jelas Anis.

Satu ruang partisipasi yang tersedia menurut Anis penting untuk diperkuat, yaitu rencana pembangunan akan berhasil, jika melalui proses perencanaan yang partisipatif, meskipun PRAKARSA selama ini berhubungan baik dengan Bappenas, namun PRAKARSA harus terus mendorong agar pemerintah lebih memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan saran, kritik, gagasan dan perencanaan pembangunan. "Saya kira penting untuk terus dilakukan, apalagi di masa pemerintahan baru," imbuh Anis.

Organisasi atau kelembagaan masyarakat sipil harus kuat, begitu juga sumber daya manusianya. Pengelolaan organisasi juga harus berdasarkan akuntabilitas dan transparansi, dan harus terus diperkuat. "Bagaimana teman-teman yang bekerja terus mendapatkan dukungan, ketika menghadapi kriminalisasi misalnya, ancaman-ancaman dari kerja activism yang dilakukan, lalu di era digital ini advokasi NGO harus beradaptasi dan berbasis teknologi, karena NGO kan berperan sebagai penyambung suara grass root dengan pemerintah. "Saya pikir penting untuk dilanjutkan, diperluas dan bagaimana NGO tetap bersinergi dalam kerja-kerja di isu pembangunan, demokrasi, perempuan, hak asasi manusia, ketenagakerjaan dan lainnya," ujar Anis.



Transformasi menjadi Think Tank Organik

*"Organizations evolve when they find better ways to serve their purpose.
Transformation is not a disruption, but a necessary growth." - (Simon Sinek)*

Pada periode 2010 hingga 2013, PRAKARSA melalui fase perencanaan strategis, yang kemudian mendorong transformasi PRAKARSA menjadi think tank organik. Pilihan antara menjadi lembaga yang lebih heavy pada model riset akademik atau fokus kebijakan yang lebih bersifat terapan menjadi topik renstra saat itu. Saat itu, pilihan yang diambil ialah agar lembaga berfokus pada riset yang relevan dengan kebutuhan kebijakan.

PRAKARSA juga terlibat dalam penguatan berbagai jejaring advokasi nasional dan internasional. Pada tahun 2012, PRAKARSA bersama dengan berbagai CSO internasional mendirikan Fair Finance International, koalisi CSO yang mendorong keuangan berkelanjutan. Pada 2013, PRAKARSA mendirikan Forum Pajak Berkeadilan, sebuah inisiatif yang berperan penting dalam mendorong reformasi kebijakan perpajakan yang adil di Indonesia. PRAKARSA juga mulai mempersiapkan riset terkait Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) dan *Illicit Financial Flows (IFF)*, yang dipublikasikan pada periode selanjutnya. Nurkholis Hidayat, peneliti Lokataru Foundation mengatakan, selama ini PRAKARSA menjadi koordinator atau leaders bagi koalisi masyarakat sipil untuk mendorong kebijakan perpajakan yang adil. "Namanya Forum Pajak Berkeadilan yang terdiri dari beberapa NGO, termasuk Lokataru Foundation," ujar Nurkholis. PRAKARSA mengajak Nurkholis sebagai peneliti (penulis), analisis dan review terkait praktik penghindaran pajak berganda, dalam hal ini melibatkan penyalahgunaan perjanjian pajak berganda di Belanda.

Belanda merupakan negara atau 'surga' suka pajak dan banyak aset-aset kekayaan Indonesia yang lari ke Belanda, menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang di Belanda untuk menghindari pajak di Indonesia, ada banyak penyalahgunaan terjadi—itu sebabnya PRAKARSA bekerjasama dengan SOMO, lembaga internasional yang berbasis di Belanda yang konsentrasinya pada *corporate accountability*. PRAKARSA mengkaji bagaimana praktik kecurangan pajak tersebut hingga mengikuti proses keputusan-keputusan pengadilan pajak yang mengalahkan pemerintah Indonesia dalam praktik *treaty shopping*.

"Riset ini cukup berpengaruh, mungkin lebih banyak di Belanda dibanding di Indonesia, "ujar Nurkholis. Kajian PRAKARSA penting menjadi rekomendasi bagi Kementerian Keuangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan perjanjian berganda, tidak hanya di Belanda, tetapi juga di Indonesia dan kemudian diikuti secara global, terkait pajak yang berkeadilan semakin banyak disuarakan. "Disitu saya terlibat, dan itu salah satu riset PRAKARSA yang bagus, signifikan untuk mendorong sistem perpajakan yang lebih adil, " imbuh Nurkholis.



Program Unggulan PRAKARSA

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has." - (Margaret Mead)

Sepanjang periode 2014 hingga 2018 PRAKARSA berhasil melakukan transformasi menjadi lembaga think tank organik, bahkan memperluas pengaruhnya dengan meluncurkan Koalisi Responsibank pada 2014, sebuah inisiatif keuangan yang berfokus pada advokasi kebijakan perbankan yang lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan. Koalisi ini didukung oleh dua lembaga donor Oxfam dan Novib, demi mendorong perbankan Indonesia untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam investasi mereka. Pada 2015, PRAKARSA menerbitkan Indeks Kemiskinan Multidimensi yang diadopsi oleh beberapa pemerintah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, untuk perencanaan kebijakan kemiskinan.

Pada 2016, PRAKARSA menerbitkan laporan riset Illicit Financial Flows (IFF), yang mengukur aliran keuangan gelap di Indonesia dan memperkuat posisinya dalam advokasi keuangan yang lebih transparan. Kolaborasi internasional, seperti dengan Global Financial Integrity dapat membantu PRAKARSA dalam memberikan kontribusi pada reformasi kebijakan fiskal di Indonesia. Pada saat yang sama, PRAKARSA juga memperluas keterlibatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bekerja sama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS Kesehatan untuk memastikan cakupan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Agus Sunaryanto, Direktur Eksekutif ICW mengenang kolaborasi dua pihak yang dilakukan PRAKARSA bersama lembaganya dalam isu-isu kesehatan, "Teman-teman PRAKARSA lebih fokus dalam penelitian, terutama riset advokasi dan memposisikan sebagai lembaga think tank. Saya pikir posisi itu sangat tepat, karena banyak menghasilkan produksi pengetahuan untuk penguatan masyarakat sipil atau kerja advokasi untuk civil society lainnya, terbukti kita dulu mengawal JKN bersama PRAKARSA."

Jika PRAKARSA berbasis produksi pengetahuan melalui hasil riset dan kebijakan, ICW mengambil posisi yang berbeda dengan mengawal pengaduan-pengaduan dan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan rumah sakit terhadap BPJS. "Jadi saat itu sempat ada informasi BPJS mengalami kerugian yang sangat besar, waktu itu ada permintaan audit dari Kementerian Keuangan kepada BPKP agar melakukan audit terhadap BPJS", ujar Agus. Audit itu sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, sehingga tahu siapa saja pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran, apakah pihak rumah sakit ataupun tenaga kesehatannya?

Sebagai organisasi yang berbasis pada anti korupsi, Agus mengingat dinamika saat itu, bahwa di internal BPJS sendiri pengawasannya tidak ketat dan kerja kolaborasi antar CSO ini juga terhalang situasi pandemi COVID 19, antara 2020 hingga

2021. Situasi darurat ini memaksa sidang-sidang dilakukan secara online dan informasi pada akhirnya dinyatakan terbuka oleh Komisi Informasi Pusat, sedangkan PRAKARSA saat itu fokus dalam menghitung iuran BPJS— karena terdapat isu kenaikan iuran BPJS, sehingga mereka melakukan kajian terkait itu; layak mengalami kenaikan atau tidak. “Kalau teman-teman PRAKARSA fokus pada isu itu, kita mengawal pada level pelanggarannya, jangan-jangan iuran dinaikkan karena terjadi kesalahan dalam tata kelola, tapi juga ada pelanggaran-pelanggaran lain, jadi titik temunya disitu,” imbuh Agus.

Bagi ICW, apa yang dilakukan PRAKARSA menambah banyak amunisi bagi CSO, karena memiliki kajian riset atau produksi pengetahuan. Tidak hanya kolaborasi soal isu JKN, tetapi bersama PRAKARSA juga mengawal soal RUU Kesehatan yang terdapat dalam Omnibus Law. “Saya rasa pada dua isu itu, ICW dan PRAKARSA, sama-sama terlibat advokasi. Mungkin di PRAKARSA tidak ada mandat untuk membuat laporan pelanggaran ke penegak hukum. Pendekatan PRAKARSA kan engagement dengan pemerintah, ya CSO memang harus bagi-bagi tugas, ada yang melaporkan ke penegak hukum dan lembaga negara, tapi ada yang mendukung amunisi kita, peran strategisnya disitu dengan PRAKARSA,” ungkap Agus.



Pengaruh di Tingkat Global dan Pembangunan Berkelanjutan

“The influence of one good person or institution can multiply the good they do in ways that can never be measured.” – (Eleanor Roosevelt)

Memasuki dekade ketiga, pada periode 2019 hingga 2023. PRAKARSA semakin memperkuat posisinya di kancah global, terutama melalui keterlibatannya dalam Civil 20 (C20) sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Sebagai focal point dalam Taxation and Sustainable Finance Working and Sustainable Finance Working Group (TSFWG), PRAKARSA memainkan peran penting dalam mengadvokasi reformasi perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan di tingkat global.

Selain itu, PRAKARSA juga memimpin advokasi terkait taksonomi hijau di Indonesia, yang menjadi komponen penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Transformasi yang dilakukan pada periode sebelumnya memungkinkan PRAKARSA untuk terus memperluas dampaknya, baik melalui riset maupun advokasi yang diakui di tingkat nasional dan global. Dengan berbagai penghargaan dan pengakuan di berbagai level nasional, regional dan internasional, membuat integritas dan kredibilitas PRAKARSA semakin memperkuat posisi sebagai lembaga think tank. Tantangan utama yang dihadapi PRAKARSA, justru memperluas penerapan riset dalam kebijakan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam konteks pembangunan hijau dan inklusi sosial.

Nurkholis Hidayat, peneliti Lokataru Foundation yang terlibat dalam riset PRAKARSA mengungkapkan, banyak riset-riset PRAKARSA yang mendorong dan mewarnai agenda-agenda kebijakan publik, termasuk penyusunan regulasi OJK untuk taksonomi hijau di Indonesia, kemudian berkaitan dengan peraturan perpajakan di Indonesia. “Policy brief PRAKARSA mendorong arsitektur perpajakan yang lebih demokratis dan lebih adil dalam menyuarakan aspirasi dari negara-negara Selatan atau negara-negara miskin, langsung di bawah UN, yang selama ini di bawah OECD. Dari pajak yang dikumpulkan, negara dapat menjalankan kebijakan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Nurkholis.

Sedangkan menurut pandangan Purnama Adil Marata, Ketua Badan Pengurus PRAKARSA, pembayar pajak terutama orang-orang kaya di Indonesia sangat sedikit— jika mengacu pada data Kementerian Keuangan. Padahal jika ingin Indonesia menjadi negara kesejahteraan, harus tertib membayar pajak. “Semakin besar pendapatan, pajaknya akan progresif. Tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat yang maju dan bisa memberikan subsidi dana kesejahteraan ke rakyatnya,

di Indonesia menaikkan pajak sedikit saja, sudah jadi polemik.”

Mayoritas pembayar pajak di Indonesia justru di sektor formal. Semisal pajak yang diperuntukkan subsidi BBM. Ironisnya, subsidi BBM justru dinikmati tidak hanya orang miskin, namun juga orang kaya dengan mobil mewahnya, karena pemerintah kesulitan dalam mengatur pajak. PRAKARSA sudah berbicara kritis terkait reformasi pajak—supaya negara dapat memberikan subsidi kepada rakyat kecil. “Tapi kenyataannya yang terjadi di global, orang-orang super kaya pun pajaknya justru kecil, sebagai individu seperti Elon Musk, Bill Gates dan lainnya di Amerika Serikat, kadang malah pajaknya kecil. Di Indonesia menjadi tugas Kementerian Keuangan untuk membidik orang-orang super kaya untuk tertib membayar pajak ke negara,” ujar Marata.



Riset-Riset Unggulan PRAKARSA

Selama dua dekade perjalanan PRAKARSA, lembaga ini telah melakukan berbagai riset unggulan yang berkontribusi dalam membangun policy conversation dan policy making di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Beberapa riset unggulan yang telah dilakukan oleh PRAKARSA antara lain: Pertama, Universal Health Coverage (UHC) Monitoring, riset ini memantau implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dan memperkuat perencanaan, serta penganggaran kesehatan di tingkat sub-nasional. Riset ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), berdasarkan data Annual Report Prakarsa 2016 lalu.

Kedua, Indeks Kemiskinan Multidimensional (IKM), pada kajian ini PRAKARSA mengembangkan dan mengukur Indeks Kemiskinan Multidimensi di Indonesia sebagai alat untuk mengidentifikasi berbagai dimensi kemiskinan yang tidak terlihat oleh indikator ekonomi konvensional. IKM telah diadopsi oleh beberapa pemerintah daerah sebagai alat perencanaan kebijakan, berdasarkan Annual Report Prakarsa 2015. Ketiga, Illicit Financial Flows (IFF), menganalisis aliran keuangan gelap yang terjadi melalui praktik penghindaran pajak, pencucian uang dan perdagangan gelap yang merugikan negara. Hasil riset ini, digunakan untuk mendukung advokasi kebijakan fiskal yang lebih adil, dan melibatkan kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan lembaga internasional seperti OECD, data berdasarkan Annual Report Prakarsa 2016.

Keempat, Bank Assessment, kajian ini mengevaluasi kebijakan investasi perbankan di Indonesia dalam kaitannya dengan keberlanjutan, inklusi keuangan dan hak asasi manusia. Riset ini didukung oleh lembaga donor seperti Oxfam Novib, serta melibatkan engagement dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Annual Report Prakarsa 2016. Kelima, Wealth Tax Research di ASEAN, meneliti potensi penerapan pajak kekayaan di negara-negara ASEAN sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Riset ini didukung oleh jaringan internasional dan berkolaborasi dengan beberapa lembaga riset dan advokasi di negara ASEAN dalam upaya harmonisasi kebijakan pajak, menurut data Annual Report Prakarsa 2023.

Menurut Bona Tua P.P, Program Manager SDGs INFID, fokus PRAKARSA yang bekerja dalam isu-isu pajak, lansia dan social protection lainnya sangat tepat. Bagaimana kelas menengah saat ini, dan belum ada pendekatannya seperti apa, PRAKARSA yang melakukan riset pada isu-isu krusial itu, jika berbicara pajak, relasinya dengan pendapatan negara dari sisi keadilan sosial, aspek itu tetap harus jadi fokus PRAKARSA, jangan sampai isu itu ditinggalkan oleh PRAKARSA ke depannya, karena isu-isu yang mereka kerjakan saat ini sangat relevan mengenai kemiskinan dan lain-lainnya. “Saya rasa PRAKARSA tidak perlu membuat program baru, karena kekhawatiran saya program yang lama akan ditinggalkan, sementara program yang lama masih sangat relevan dan belum ada yang mengerjakan juga,” ujar Bona.



Kontribusi PRAKARSA dalam Kebijakan Sosial dan Ekonomi

"The research we conduct must aim to break the cycle of injustice and inequality, ensuring that every voice is heard and every life is valued." - (Shirin Ebadi)

PRAKARSA sebagai lembaga yang berbasis riset dan advokasi kebijakan publik telah berkontribusi bagi lahirnya ide-ide inovatif, serta kebijakan yang transformatif di Indonesia. Salah satu isu utama yang sukses di dorong oleh PRAKARSA sebagai think tank diantaranya; implementasi sistem jaminan sosial nasional— yang mana UU Sistem Jaminan Sosial Nasional itu meskipun sudah disahkan pada periode akhir pemerintahan Presiden Megawati hingga pemerintahan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) periode pertama selesai, amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional itu tidak diimplementasikan.

Sehingga pada periode 2009, 2010 hingga 2011, PRAKARSA bersama organisasi masyarakat sipil lain menyusun legal drafting pelaksanaan SJSN dan menyerahkan kepada parlemen. "Pada saat itu 2009, diterima oleh Fraksi Demokrat sebagai partai penguasa, menjelang akhir, terus PDIP sebagai oposisi. Nah, tapi hingga masa periode Presiden SBY berakhir, pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional itu tidak terlaksana, tetapi kemudian di awal periode kedua Presiden SBY pada 2010, PRAKARSA melakukan perubahan yang strategis yaitu dengan berkolaborasi dengan organisasi serikat buruh," ujar AH Maftuchan, Direktur Eksekutif PRAKARSA.

Momen inilah yang menjadi catatan penting, bahwa PRAKARSA dan TURC berkeliling ke banyak organisasi serikat buruh untuk sosialisasi sistem jaminan sosial nasional, bahkan akhirnya terkonsolidasi antara kekuatan organisasi serikat buruh yang ada di Indonesia. "Saat itu PRAKARSA menyampaikan kalau gerakan buruh hanya fokus pada isu domestik dan isu normatif, yaitu kenaikan upah yang terjadi, tidak bisa mengikuti kenaikan inflasi yang terjadi, sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan lainnya," ungkap Maftuchan.

Pada 2010 hingga 2011, menorehkan sejarah baru bahwa seluruh konfederasi serikat baru bersatu untuk melakukan agenda bersama, yaitu jaminan sosial, dengan terbentuknya KAJJS atau Komite Aksi Jaminan Sosial. Lalu serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil memobilisasi ke berbagai kota dengan demonstrasi massa dan terjadi di kota-kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banten, Medan dan kota-kota lainnya. Isu krusial jaminan sosial, akhirnya menjadi gelombang protes yang masif, selain itu KAJJS juga melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Jakarta Pusat. "Saya saat itu adalah salah satu penggugat di pengadilan. Gugatan citizen Law suit dan akhirnya menang dan pemerintah atau Presiden SBY dan Ketua DPR RI di hukum pengadilan untuk melaksanakan jaminan sosial dan denda Rp 1. Akhirnya proses di parlemen dan pemerintah pun terjadi, kemudian terjadilah implementasi UU BPJS, jadi gerakan pada 2010 hingga 2011 itu mampu menghasilkan UU BPJS.

PRAKARSA sebagai think tank yang memproduksi pengetahuan terutama riset dan advokasi kebijakan— tidak hanya engage dengan parlemen dan pemerintah, tetapi juga serikat buruh, khususnya dalam memperjuangkan jaminan sosial nasional dan akhirnya komite aksi jaminan sosial, hingga Indonesia berhasil memiliki program jaminan sosial nasional, baik ketenagakerjaan dan kesehatan. "Itu tonggak sejarah bagi Indonesia dan kami turut berkontribusi dalam proses itu, kami teruskan isu jaminan sosial nasional ini dan diberlakukan pada Januari 2014 di era pemerintahan Presiden SBY," ujar Maftuchan.

PRAKARSA tidak berhenti disitu, tapi melanjutkan kerja-kerja dengan monitoring, evaluasi, pelaksanaan BPJS

ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Bahkan menjalin kerjasama (MoU) dengan DJSN atau Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk penguatan monitoring yang partisipatif terhadap BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Kontribusi PRAKARSA dalam memajukan program jaminan sosial nasional sampai pada level implementasi dan monitor evaluasi. "Dulu ada istilah sakit sedikit jatuh miskin, sekarang penyakit apapun bisa di cover oleh BPJS kesehatan dan yang menarik lagi adalah skema iuran yang ditanggung oleh pemerintah, tidak hanya kelompok miskin, tapi juga kelompok setengah miskin," ungkap Maftuchan.

Bahkan PRAKARSA dengan DJSN berkolaborasi untuk mendorong kelas rawat inap bagi pasien standar. Jadi tidak ada perbedaan kelas 1, 2, 3, karena seringkali ruang inap kelas 3 tidak ada kamar yang dapat digunakan oleh pasien dan kemudian tidak dilakukan tindakan medis. Berkat PRAKARSA dan mitranya, ruang inap tanpa strata kelas, uji coba ini sudah dilakukan di beberapa kota dan di beberapa rumah sakit.

Kontribusi lain yang perlu menjadi catatan penting, yaitu di isu fiskal atau pajak, yaitu pada saat pemerintah menyusun UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 2021, beberapa kebijakan di Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 Tahun 2021 itu PRAKARSA berkontribusi, bahkan di undang Direktorat Jenderal Pajak untuk membahas pajak karbon, peningkatan tarif pajak dan menasar kelompok menengah atas. Kalau dulu pajak tertinggi 30 persen, sekarang naik 35 persen bagi mereka yang berpenghasilan tahunan diatas 5 milyar, dulu tertinggi hanya 500 juta.

PRAKARSA boleh dibilang merupakan salah satu organisasi sipil yang pertama memperkenalkan isu pajak di kalangan organisasi masyarakat sipil sebagai isu yang penting dan harus menjadi konsen organisasi masyarakat sipil. Bahkan isu pajak akhirnya menjadi tema penting dalam debat Capres dan Cawapres. Bahkan pada 2015, PRAKARSA telah mengusulkan pembentukan BPN atau Badan Penerimaan Negara sebagai reformasi kelembagaan. PRAKARSA membuktikan mampu menjaga konsistensi produksi ide-ide inovatif yang kemudian mempengaruhi perdebatan publik dan kemudian mempengaruhi pembuat kebijakan.



Dampak dan Pencapaian Signifikan PRAKARSA

"It always seems impossible until it's done." - (Nelson Mandela)

Selama dua dekade terakhir, PRAKARSA telah menghasilkan dampak positif melalui berbagai inisiatif dan riset unggulannya. Kontribusi PRAKARSA dalam reformasi kebijakan fiskal di Indonesia, khususnya advokasi pajak yang lebih adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah, telah mempengaruhi pembuatan kebijakan. PRAKARSA juga memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan jaminan sosial yang inklusif dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mereka aktif dalam memberikan masukan terhadap dokumen taksonomi hijau di Indonesia dan berkontribusi pada pengembangan RPJP 2025-2045, melalui keterlibatan aktif dalam forum global dan riset kolaboratif, PRAKARSA terus berperan dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Pada periode sebelumnya 2022, PRAKARSA juga mencatatkan sejarah bagi Indonesia, menjadi tuan rumah G20 dan PRAKARSA menjadi "tuan rumah" Civil 20 (C20) Indonesia. Tentu prestasi ini merupakan pencapaian yang sangat bernilai bagi PRAKARSA, tidak hanya bagi anggota tim PRAKARSA tetapi juga mitra-mitra lainnya yang turut mendukung suksesnya G20 dan

C20 di Indonesia. Bona Tua P.P, Program Manager SDGs INFID mengapresiasi kerja-kerja PRAKARSA, "G20 Indonesia kan INFID dan PRAKARSA menjadi sherpa G20, sekarang PRAKARSA masih menjadi adviser di komite untuk G20 di Brasil. Selain sebagai lembaga think tank, juga membuktikan berhasil bekerja di area lokal, nasional, dan regional, bahkan internasional. Menariknya, dalam usianya yang ke 20, PRAKARSA sudah menjadi wakil CSO di dalam negeri dan luar negeri. Ketika di luar negeri ada rekognisi, yang memiliki posisi strategis tidak hanya pemerintah, tetapi juga lembaga think tank seperti PRAKARSA, selain itu ada lembaga-lembaga internasional seperti UN, World Bank, ADB, IMF dan lainnya, mereka semua rekognisi CSO dan PRAKARSA mengisi area-area itu."

Keberhasilan PRAKARSA sebagai lembaga think tank juga membangun kemitraan dengan Ford Foundation untuk program Building Institutions and Network (BUILD) yang dimulai sejak 2021, dengan memberikan dukungan untuk pengembangan kelembagaan baik strategi organisasi, sumber daya manusia, pengetahuan dan sumber daya lainnya untuk mencapai dampak dan memajukan sistem, melalui program BUILD ini, PRAKARSA mulai membangun keberlanjutan dan ketahanan organisasi secara keuangan. Maryati Abdullah, Program Officer Ford Foundation mengatakan, "Kami sebagai filantropi yang bergerak di isu social justice, Ford Foundation memberikan support berupa grant yang bersifat jangka panjang terhadap PRAKARSA, agar memiliki ketangguhan dalam organisasi atau institusional resilience dari sisi keuangan dan expert. Harapan kami, bagaimana PRAKARSA bisa membangun think tank network di kawasan regional Asia maupun di tingkat global, menurut saya hal seperti ini strategis sekali untuk dikembangkan oleh PRAKARSA ke depannya."

Bagi lembaga donor seperti Ford Foundation, pencapaian PRAKARSA dalam membawa suara masyarakat sipil ke G20 merupakan value yang penting. Itu sebabnya, Ford Foundation memberikan dukungan untuk PRAKARSA agar melakukan penguatan organisasi. PRAKARSA dinilai sebagai organisasi yang memiliki kapasitas secara expertise dan secara substansial, selain mampu memimpin koalisi yang bernama Tax Justice Reform, dan juga memiliki network yang berkaitan dengan G20 dalam mengangkat isu-isu strategis; inklusivitas, social justice dan lainnya. PRAKARSA juga telah mengembangkan kebijakan fiskal dan kesejahteraan yang menyuarakan kepentingan masyarakat. PRAKARSA memainkan peran yang strategis kepada bentuk reformasi kebijakan yang konkrit, misalnya isu keuangan, isu pajak, isu keadilan gender, isu lingkungan hidup dan lain-lainnya, sehingga peran Indonesia lebih baik dan lebih produktif di level internasional, terutama saat Indonesia menjadi Presidensi G20.



Strategi Media dan Komunikasi PRAKARSA

"The medium is the message." - (Marshall McLuhan)

Branding sangat penting dalam membangun citra organisasi. Upaya PRAKARSA tidak sia-sia, selama beberapa tahun ini PRAKARSA telah mampu membangun profil dan branding sebagai lembaga think tank yang kredibel di media arus utama nasional seperti Kompas, Tempo, METRO TV, CNN Indonesia, Tirto, VICE, Detik dan lainnya. Kebutuhan untuk menyusun strategi komunikasi dan media, telah dilakukan oleh PRAKARSA dengan membangun tim media and communication.

Tidak hanya itu, beberapa staf PRAKARSA juga menjadi narasumber di berbagai media-media nasional yang multi-platform baik media digital maupun media audio visual. Bahkan para staf PRAKARSA juga menulis artikel di media massa dengan berbagai isu-isu strategis, seperti ekonomi pembangunan, kemiskinan, pajak, jaminan sosial dan kebijakan publik lainnya. Sebagai lembaga think tank harus menjalin hubungan baik dengan media— sebab PRAKARSA memproduksi pengetahuan dan

dan kebijakan-kebijakan yang menjadi area liputan para jurnalis.

Ikram Putra, Editor BenarNews, media online yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat ini menuturkan, "Kali pertama saya mengetahui tentang PRAKARSA, saat saya masih bekerja di The Conversation, yang kerap menerbitkan artikel yang ditulis oleh para peneliti PRAKARSA." Pemikiran dari riset-riset PRAKARSA seringkali menjadi rujukan jurnalis, karena policy brief dengan analisis yang mendalam, menjadi rujukan dalam penulisan sejumlah jurnalis yang mengangkat isu-isu tentang kebijakan publik. Seperti Ikram, dia berharap PRAKARSA memiliki stamina untuk mengawal pemerintah supaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang senantiasa berbasis bukti. Seringkali kebijakan pemerintah yang tidak populis juga merugikan pekerja media yang dilindungi oleh UU Pers.

Sedangkan bagi Abdul Manan, Tempo, tradisi pengetahuan yang dilakukan PRAKARSA dengan menerbitkan buku panduan bagi jurnalis untuk isu-isu yang spesifik sangat penting, seperti buku panduan peliputan terkait anggaran yang pro rakyat miskin. Para jurnalis yang memiliki area liputan ekonomi, tentu sangat terbantu dari sisi produk pengetahuan. "Pengawasan anggarannya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Jurnalis menulis isu anggaran supaya punya konsen terhadap kepentingan publik yang lebih besar," ujar Manan.

Bagi Manan yang bekerja di media berbasis cetak dan terbit mingguan, kedalaman berita itu harus berbasis fakta yang teruji kebenarannya. PRAKARSA membagikan hasil seminar, diseminasi hasil penelitian dan lainnya, tentu akan menjadi acuan bagi jurnalis dalam memahami isu-isu dalam liputannya. "Kalau melihat yang dilakukan oleh PRAKARSA kan berusaha mempengaruhi kebijakan publik melalui riset-riset yang mereka buat, ada semacam pembentukan opini publik dan menghasilkan studi-studi atau policy brief terbaru," ungkap Manan.

Sedangkan bagi Binny Bintarti Buchori, pendiri PRAKARSA, sudah saatnya sebagai lembaga think tank yang memproduksi pengetahuan PRAKARSA melakukan kolaborasi dengan jurnalis yang biasa menulis in depth report dan investigative report, yang fokus pada isu tertentu. "Jangan jurnalis diajak melulu menceritakan kehidupan kita dan disebarkannya lagi, tetapi sebaiknya kolaborasi dengan penelitian bareng, menulis jurnal bareng sehingga jurnalis juga penting perannya," ujar Binny. Para jurnalis yang bekerja dengan berbagai isu seperti Manan dan Ikram, dengan produksi pengetahuan yang dilakukan PRAKARSA untuk membantu jurnalis dalam memahami isu-isu yang sangat spesifik, tentu sangat penting dan bermanfaat, Manan misalnya, sangat terbantu terutama mengetahui secara detail dimana titik krusial dalam pembahasan anggaran, istilah-istilah teknik dengan bahasa yang teknokratis tentang anggaran akan menyulitkan jurnalis untuk menuliskan laporan yang komprehensif, selain soal teknisnya tentu ada isu etik, jadi cukup membantu jurnalis yang tidak memiliki latar belakang ekonomi (jurnalis non desk ekonomi).

Selain menjaga hubungan baik dengan media arus utama, PRAKARSA juga memiliki website dwibahasa sejak 2005, organisasi telah mendesain ulang website agar mudah di akses dan di baca oleh publik. Ruang maya kini menjadi trend, apalagi dengan munculnya berbagai platform digital di sosial media seperti Tiktok, IG, FB dan X yang lebih digandrungi anak-anak muda. Website PRAKARSA mencoba untuk tampil lebih segar dan lebih sesuai dengan profil sebagai lembaga think tank, dilengkapi dengan fasilitas penjangkaran identitas (login user) bagi pengunjung yang ingin mendapatkan data dalam versi lengkapnya, seperti makalah-makalah, cuplikan buku dalam bentuk PDF dan lainnya. Dilihat dari statistik pengunjung situs PRAKARSA ini rata-rata dikunjungi oleh hampir 900-an pengunjung per bulan, sedang informasi yang seringkali di akses, lebih banyak isu-isu tentang negara dan globalisasi.



Tantangan dan Kolaborasi Lintas Stakeholder

"To overcome challenges, we need to build partnerships across sectors, working together to solve problems no one can solve alone." - (Kofi Annan)

PRAKARSA sebagai think tank mengambil peran yang strategis dan membuka diri dengan banyak kolaborasi dalam riset, kebijakan dan advokasi. Semisal, PRAKARSA dengan stakeholder-nya melakukan riset bersama, pelatihan kepemimpinan, pendampingan dan lainnya, tentu tujuan dari aktivitas yang digagas ini akan menjadi alternatif dalam menciptakan kepemimpinan masyarakat sipil di Indonesia, dan agar memiliki kapasitas yang tangguh. Purnama Adil Marata, salah satu pendiri PRAKARSA menyaksikan perubahan yang signifikan dalam 20 tahun berdirinya lembaga think tank ini.

Kolaborasi dengan universitas-universitas yang prestisius di Inggris dan Amerika Serikat, telah dilakukan oleh PRAKARSA, "Konteksnya untuk memperbaiki kualitas pengetahuan, kita harus semakin banyak kerjasamanya dengan berbagai sektor, harus kerjasama intensif untuk mengatur kebijakan, baik di pemerintah, parlemen, universitas dan lainnya. Levelnya harus lebih tinggi, kualitas juga harus lebih tinggi lagi, baik di dalam negeri dan luar negeri," ungkap Marata.

Dia juga mengingatkan pentingnya PRAKARSA membekali kapasitas organisasi dan meningkatkan kapasitas timnya. Langkah strategis itu menurut Marata sangat penting, melihat gerak dari perubahan global yang sangat cepat. "Misalkan PRAKARSA dapat memberikan beasiswa pascasarjana ke timnya, meski tidak penuh, sebagai bentuk investasi ke depan, SDM di internal harus diperbaiki. Selama ini masalah LSM, selalu kekurangan atau sulit mencari SDM yang baru yang berkualitas, mereka yang potensial selalu larinya ke sektor pemerintah dan swasta. Tantangannya berat memang, jika mau efektif melakukan advokasi, mempengaruhi kebijakan, juga harus mampu bersaing di pasar kerja," ujar Marata.

Jika bekerja sama dengan Inggris misalnya, sekaligus mengirimkan staf untuk belajar, itu menurut Marata menjadi bagian dari investasi pengetahuan. Selain memperkuat kapasitas di dalam, perlunya merekrut sosok potensial lainnya seperti para doktor di bidang-bidang yang strategis, "Tapi ya harus ada uangnya untuk merekrut," kelakar Marata. Kalau mereka terlibat di PRAKARSA apakah produk-produk mereka di apresiasi oleh pihak lain, PRAKARSA secara strategis juga memperbaiki strategi advokasi— supaya mudah diterima oleh para perumus kebijakan. Kualitas produk yang dihasilkan juga bisa diterima stakeholder, dapat masuk level eselon I atau menteri. "Riset sangat teknis, tetapi memproduksi policy brief itu bagi pembacanya tidak harus menguasai secara saintifik, para menteri dan perumus kebijakan itu lebih suka membaca laporan yang populer dengan bahasa yang mudah dipahami, PRAKARSA harus memproduksi itu, juga perlunya media," ujar Marata.

Tentu selaras dengan misi PRAKARSA yang ingin meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil agar mampu menghasilkan ide-ide dan inovasi-inovasi, serta memajukan kepemimpinan dari organisasi masyarakat sipil yang berpengaruh dalam upaya mendorong atau memberi dampak dalam upaya Pencapaian Keadilan Sosial. Binny Bintarti Buchori mengingatkan PRAKARSA sebagai NGO dan think tank akan menghadapi tantangan yang sama dengan lembaga-lembaga lainnya, terutama financial sustainability, apalagi dengan masalah ekonomi global sekarang.

Makanya *think tank* harus independen dengan melakukan riset-riset pada isu-isu yang krusial. Jadi semakin memperkuat jejaring akan lebih memperkuat posisi PRAKARSA juga. "Misalnya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk isu krusial social policy yang pro green budgeting itu salah satu yang bisa dirintis. Kebijakan yang *pro green* dalam mengatasi *climate*

change itu pasti akan digunakan, jadi kayak kebijakan poverty inequality. Jika tantangannya financial sustainability dan relevansinya, ya dengan tema-tema jangka menengah dan jangka panjang. Apakah PRAKARSA harus membuat artikel-artikel yang lebih populer, supaya dapat dukungan publik, juga perlu menurut saya, selain menggunakan sosial media seperti INFID dan KLHK juga, “ungkap Binny. Sedangkan menurut Victoria Fanggidae, Deputy Direktur PRAKARSA, “Makin banyak konsorsium dan kolaborasi dengan universitas, kita bisa memberikan value masing-masing, misalkan teman-teman kampus juga sering menanyakan “kita sering advokasi isu ini ya” kita mengisi celah itu, sebaliknya kita harapkan mereka mengisi di celah riset akademis, kita memang less-strong daripada itu, “ujar Victoria.



Harapan Para Mitra Pembangunan untuk Masa Depan PRAKARSA

*“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world.
Today I am wise, so I am changing myself.” - (Rumi)*

Transformasi PRAKARSA sebagai think tank organik memberikan peluang untuk lebih kuat dalam membangun perannya dalam CSO baik di dalam negeri dan luar negeri. PRAKARSA juga dikenal karena sumbangan pemikiran-pemikiran dalam memainkan isu yang strategis dan krusial. Pencapaian PRAKARSA di mata lembaga donor internasional juga cukup baik, seperti yang diungkapkan Ford Foundation. “Pencapaian PRAKARSA adalah dalam memprakarsai tax justice network di tingkat nasional, dan juga kepemimpinan yang baik di level Asia Pasifik dan internasional, “ujar Maryati Abdullah, Program Officer Ford Foundation.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai cita-cita; masyarakatnya yang sejahtera, adil, makmur dan demokratis— dengan sumber daya alam dan kekayaan maritim yang melimpah, berbasis pangan, pertanian, kelautan, pertambangan, hutan dan lainnya, menurut Ford Foundation peran kesejahteraan sosial yang dimainkan oleh PRAKARSA sangatlah penting dan strategis, karena menyentuh ke persoalan-persoalan basis masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan. “Misalnya, bagaimana petani mendapatkan akses terhadap hasil perikanan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan? Lalu tata kelola perikanan seperti apa? Tata kelola penerimaan negara seperti apa? Dan lain-lainnya”, menurut Maryati.

Secara umum, sektor-sektor itu penting, karena berhubungan dengan kesejahteraan dan mata pencaharian utama masyarakat Indonesia dengan karakteristik sumber daya alam dan maritim yang berbasis masyarakat. “PRAKARSA punya potensi besar melakukan itu, saya kira pemerintah akan terbantu sekali untuk mendapatkan perspektif dari reformasi kebijakan dari PRAKARSA. Selain itu juga, dampak terbesarnya memberikan referensi kebijakan di studi-studi yang dilakukan PRAKARSA, dalam menjembatani suara antara masyarakat sipil atau CSO dengan think tank atau pemerintah, contoh terbesarnya seperti yang terjadi di G20, terutama isu-isu SDGs, “tambah Maryati.

Bagi Ford Foundation kolaborasi dengan CSO dan think tank seperti PRAKARSA jelas memberikan kontribusi dalam menciptakan diskursus tentang penanggulangan kemiskinan, indikator yang multidimensi dan lainnya, di tingkat nasional dan internasional, PRAKARSA mengangkat isu-isu dalam pembangunan, SDGs dan lainnya, “Saya pikir itu penting, berkolaborasi dan berkontribusi untuk mengangkat keadilan pajak dan isu lainnya, itu sejalan dengan agenda Ford Foundation untuk mengatasi ketimpangan dan mencapai kesejahteraan sosial, “ujar Maryati.

Sebagai Program Officer Ford Foundation yang berhubungan dengan CSO, Maryati menyarankan PRAKARSA harus punya patron jangka panjang untuk menelusuri efektivitas kebijakan yang sudah direkomendasikan, misalnya begitu hasil riset sudah

didiskusikan dengan pembuat kebijakan, tidak berhenti disitu saja, tetapi membantu bagaimana merealisasikan bentuk-bentuk reformasi institusional atau kebijakan itu pada pemerintah, misalkan ada model kebijakan engagement. "Dulu PRAKARSA menyuarakan tentang kebijakan fiskal atau badan penerimaan negara. Nah, di pemerintahan baru ke depan bagaimana PRAKARSA membantu mewujudkan efektivitas kerja dari badan penerimaan negara itu, karena kan jantung untuk menciptakan kesejahteraan sosial," terang Maryati.

Tidak hanya hubungan baik dengan lembaga-lembaga donor internasional, PRAKARSA juga memiliki hubungan baik dengan lembaga pemerintah seperti Bappeda DK Jakarta, Agnes Ginting, "Secara kelembagaan sendiri, Pemprov DK Jakarta dan PRAKARSA telah terjalin sangat lama." Riset-riset PRAKARSA bagi Bappeda penting, khususnya bagi perencana di Bappeda. PRAKARSA juga merupakan mitra yang secara aktif mendukung Bappeda dalam mempertajam muatan kebijakan. Menurut Agnes, "Kami punya tugas untuk mengoordinasikan dokumen perencanaan baik itu RPJPD yang sifatnya jangka panjang, RPJMD yang sifatnya jangka menengah, RKPJ yang bersifat tahunan, selain itu kami sangat di dukung oleh PRAKARSA dalam memastikan muatan-muatan kebijakan di dalam rencana aksi yang bersifat tematik seperti, rencana penanggulangan kemiskinan daerah, rencana daerah untuk penyandang disabilitas, rencana aksi untuk membangun kepemudaan dan sebagainya. Ini muatan substansinya relevan dan sejalan dengan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkeadilan."

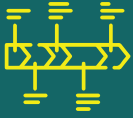
Pada sisi yang lain, Bappeda menilai kinerja pembangunan daerah sangat mementingkan kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem di DK Jakarta terus membaik, dibandingkan pada saat terjadinya pandemi COVID 19, dan pencapaian programnya tidak bisa dilepaskan dari sumbangsih pemikiran PRAKARSA melalui riset-riset dan advokasi kebijakan yang konsisten dilakukan agar organisasi masyarakat sipil—khususnya perkumpulan PRAKARSA yang membantu mempertajam kebijakan di daerah, khususnya Pemprov DK Jakarta. "Kami melihat konsistensi PRAKARSA dalam mengawal kemiskinan multidimensi, kemudian pembangunan yang inklusif melalui hak-hak penyandang disabilitas dan lansia, ini yang kemudian yang kami nilai sangat membantu kami menjaga kebijakan di Jakarta," ungkap Agnes.



Selama dua dekade terakhir, PRAKARSA telah menunjukkan dedikasinya dalam mendorong perubahan kebijakan yang berkeadilan melalui riset dan advokasi. Kontribusi lembaga ini, baik di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan telah menjadi fondasi penting dalam mencapai berbagai capaian strategis. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pendiri, pengurus harian, hingga para mitra lokal dan internasional yang turut berperan dalam memperkuat kapasitas dan visi PRAKARSA. Kolaborasi lintas sektor yang dibangun selama ini telah menjadi fondasi yang kokoh bagi lembaga ini dalam mendorong reformasi kebijakan yang berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.

Menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan keberlanjutan ekonomi, PRAKARSA berkomitmen untuk terus memperkuat perannya. Dengan fokus pada peningkatan kapasitas internal dan kolaborasi lintas sektor, PRAKARSA akan terus menghasilkan kebijakan yang relevan dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan upaya menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dengan pijakan yang kokoh dari dua dekade pengalaman, PRAKARSA siap berperan aktif dalam mendukung transformasi Indonesia menuju 2045. Dalam dua puluh tahun ke depan, PRAKARSA akan terus memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya kebijakan publik yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing global.



Kronik PRAKARSA Dua Dekade Anniversary 20th The PRAKARSA

2024

Mendapat rekognisi resmi di tingkat nasional-regional-global dalam advokasi isu pajak, tata kelola publik dan pembangunan: i) Direktur Eksekutif PRAKARSA mendapatkan undangan resmi untuk menyampaikan intervensi di The 2024 ECOSOC Special Meeting on International Tax Matters di kantor pusat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York, ii) PRAKARSA mengkoordinir kerja advokasi pajak kekayaan (*wealth-tax*) dan UN Tax Convention lewat C20, lewat Fair for All network, dan lewat Global Alliance for Tax Justice, iii) Direktur Eksekutif PRAKARSA dan Bendahara Badan Pengurus PRAKARSA menjadi anggota International Advisory Committee C20 Brazil – Presidency G20 Brazil 2024; (iv) Direktur Eksekutif PRAKARSA menjadi anggota Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development); (iv) Direktur Eksekutif PRAKARSA terpilih sebagai Steering Committee of Fair Finance Asia (FFA) 2024-2026.

2023

Meniskus advokasi kebijakan di level global dan regional: i) menjadi Troika C20 India dan International Advisory Committee C20 India pada Presidensi G20 India 2023, ii) memimpin penyusunan rekomendasi kebijakan tentang disability, equity, and justice oleh C20 India 2023 dan bersama OHANA menyelenggarakan side-event pada C20 Summit India 2023 “Enabling the Provision of Assistive Device and Technology in The Global South: Barriers and Realistic Action Plan”, iii) memperkuat isu perlindungan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan inklusif bisnis pada side-event KTT ASEAN ke 42 di Indonesia 2023.

Memperkuat produksi pengetahuan secara kolaboratif di tingkat ASEAN:

Memimpin riset tentang Asimetri Sistem Perpajakan dan Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan bersama TAFJA/Tax and Fiscal Justice Asia, VESS Vietnam dan TWN di Filipina.

Memperkuat kerja sama dengan universitas:

Bekerjasama dengan LPPSP FISIP UI untuk penyelenggaraan pelatihan analisis kebijakan dan penulisan policy brief untuk publik secara regular.

Menjaga konsistensi produksi buku:

(i) Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital, (ii) Buku Panduan untuk Bank: Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia dan Aspek Gender dalam Kerangka Pinjaman dan Investasi

2022

Kapasitas bekerja di tingkat nasional, regional dan internasional meningkat: i) menjadi Sekretariat Civil-20 (C20) pada Presidensi G20 Indonesia 2022, ii) Direktur Eksekutif PRAKARSA menjadi Sherpa C20 Presidensi G20 Indonesia 2022 dan Manager Program PRAKARSA menjadi Co-chair C20 Presidensi G20 Indonesia 2022; (iii) menjadi lead-organization untuk project Fair for All tingkat regional Asia, khususnya Asia Tenggara dan memimpin riset wealth tax di tingkat regional Asia.

Mendapat penghargaan Indonesia's SDGs Actions Awards 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pemenang Terbaik II kategori lembaga penelitian atas kontribusi dalam pencapaian SDGs di Indonesia.

2021

Berhasil berkolaborasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah antara lain:

i) MoU PRAKARSA dengan DJSN tentang pengembangan monitoring partisipatif jaminan sosial dan produksi evidence/knowledge, ii) pelaksanaan monitoring Balai Latihan Kerja Komunitas dan penyusunan isu prioritas Employment Working Group G20 Indonesia 2022 - Kementerian Ketenagakerjaan RI, iii) pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Nasional SDGs Bappenas RI, iv) pelaksanaan penyusunan draft Rencana Aksi nasional Global Compact for Mitigation (GCM) Kementerian Luar Negeri RI, v) melaksanakan agenda "prioritas riset nasional" 2020 - 2024 Kementerian Ristek/BRIN, vi) terlibat aktif dalam penyusunan RUU Harmonisasi Peraturan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, vii) re-engage dengan Green Economy Caucus DPR RI, viii) kerja sama dengan OJK dalam penyusunan Green Taxonomy Indonesia, dan ix) kerja sama dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI.

Mendapatkan penghargaan Pelatihan Vokasi Award 2021 kategori "Mitra Pelatihan Vokasi" dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas kontribusi PRAKARSA dalam pemajuan agenda pelatihan vokasi di Indonesia

2020

Menjaga kepeloporan dan mempromosikan ide-ide kebijakan inovatif: universal basic income (Jamesta - Jaminan Pendapatan Dasar Semesta) dan mendorong isu lansia sebagai salah satu prioritas bagi semua kalangan. Menginisiasi pembentukan jejaring baru di tingkat nasional: Koalisi Jaminan Penghasilan Dasar (JAMESTA) dan Koalisi untuk Masyarakat Peduli Usia Lanjut (KuMPUL).

2019

Memperluas dan memperkuat peran di tingkat global dan regional: i) menjadi Coordination Committee dari Global Alliance for Tax Justice (GATJ) - jejaring CSO dan think tank di tingkat global yang konsen di isu pajak, ii) terpilih sebagai Co-coordinator Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA) periode 2019 - 2022 - jejaring CSO dan think tank di tingkat Asia yang konsen di isu pajak, iii) menjadi inisiator pembentukan Fair Finance Asia (FFA) yang konsen mendorong industri keuangan atau perbankan agar menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan di tingkat Asia, iv) menerbitkan buku Public Private Partnership (Public and Private Partnerships) in the Agricultural Sector.

2018

Menjadi rujukan dalam isu kerja layak untuk pengemudi ojek online melalui hasil penelitian berjudul "GO-JEK: Kemacetan, Informalitas dan Inovasi Transportasi Perkotaan di Indonesia". Menerbitkan buku i) Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional Yang Non-Diskriminatif, ii) Fair Finance Guide International Methodology 2018.

Menginisiasi dan menjadi sekretariat dari People's Summit on Alternative Development, 8-10 Oktober 2018 di Sanur Bali sebagai pertemuan antar organisasi masyarakat sipil se dunia dalam rangka merespon Annual Meetings IMF/WB Group 2018 di Bali Indonesia.

2017

Menjalin kerja sama dengan lembaga riset internasional: i) penelitian tentang open government di Indonesia dengan The Institute of Development Studies, ii) penelitian tentang illicit tobacco dan reformasi kebijakan cukai rokok di Indonesia dengan Health Policy Center University of Illinois at Chicago USA, iii) penelitian mengenai The Gojek Problem: congestion, informality and innovation in urban transport in Indonesia dengan LIPI dan ANU, iv) penelitian mengenai A Socially Equitable Energy Transition in Indonesia bersama Technical University of Munich Germany.

2016

Bersama dengan Koalisi Forum Pajak Berkeadilan merilis laporan bertajuk "Mesin Uang Makau". PRAKARSA juga menginisiasi penghitungan aliran keuangan gelap di Indonesia yang mendapatkan dukungan dari lembaga internasional seperti OECD.

Menerbitkan buku: i) Transformasi Kesejahteraan: Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta, ii) Panduan Jurnalis: Isu Kesehatan

2015

Berhasil menyusun laporan kebijakan “Kelembagaan dan Tata Kelola Perpajakan Perlu Perubahan” dan menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk penataan kelembagaan yaitu pemerintah perlu melakukan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan. ii) Mempublikasikan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM), yang kemudian diadopsi oleh berbagai pemerintah daerah salah satu pertimbangan perencanaan kebijakan kemiskinan. iii) menerbitkan buku “Pembangunan Inklusif – Prospek dan Tantangan Indonesia”.

2014

Pembentukan dan peluncuran Koalisi ResponsiBank Indonesia, yang mengadvokasi kebijakan keuangan berkelanjutan. Menerbitkan buku (i) Advokasi Pajak Berkeadilan – Alat Bantu untuk Masyarakat Sipil, (ii) Pembangunan Ekonomi & Terancamnya Hak-hak Dasar Masyarakat.

2013

Meluncurkan Forum Pajak Berkeadilan untuk mendorong reformasi perpajakan yang lebih adil. Berhasil menginisiasi lahirnya Green Economy Caucus (GEC) DPR RI, kaukus anggota parlemen Indonesia lintas partai politik dan lintas komisi di DPR RI. GEC bekerja untuk meningkatkan peran parlemen dalam isu ekonomi hijau dan perubahan iklim.

2012

Bersama dengan Tim Advokasi Koalisi APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat mengadvokasi kebijakan pembelian pesawat kepresidenan era Susilo Bambang Yudhoyono.

Menginisiasi Fair Bank Guide di Indonesia dan melakukan riset mengenai kebijakan perbankan yang pro *sustainable development, financial inclusion, consumer dan human rights*.

2011

Mempromosikan kebijakan dan budgeting untuk menekan angka kematian ibu di Indonesia oleh DPR. Bersama Komite Aksi Jaminan Sosial berhasil mendorong lahirnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Era baru pelaksanaan jaminan sosial semesta di Indonesia.

2010

PRAKARSA bertransformasi menjadi think tank organik yang mengutamakan riset kebijakan publik berbasis bukti. Menerbitkan buku Anggaran Pro-Kaum Miskin: Panduan untuk Jurnalis.

Berhasil melakukan mainstreaming isu jaminan sosial di beberapa konfederasi serikat buruh bersama TURC yang mempengaruhi pembentukan Komite Jaminan Sosial Nasional (KAJS) untuk advokasi pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional.

2009

Menerbitkan buku: (i) Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia: lebih dari sekadar pengurangan kemiskinan; (ii) Anggaran Pro-kaum Miskin: sebuah upaya menyejahterakan masyarakat. Bersama beberapa organisasi masyarakat sipil menyusun legal drafting jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang diserahkan secara resmi ke Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat di DPR RI.

2008

Menerbitkan buku Menjinakkan Metakuasa Global: suara Indonesia untuk globalisasi yang lebih adil.

2007

Menggunakan tag-line "Civil Society for Better Indonesia" sebagai orientasi fokus kerja PRAKARSA: memperkuat organisasi masyarakat sipil. Ide utamanya adalah bahwa organisasi masyarakat sipil yang kuat akan berkontribusi bagi Indonesia yang lebih baik.

2006

Menerbitkan tiga buku sekaligus: (i) Mimpi Negara Kesejahteraan, (ii) Globalisasi Menghempas Indonesia, dan (iii) Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi.

2005

Menerbitkan buku Orde Partisipasi: Bunga Rampai Partisipasi dan Politik Anggaran.

2004

Perkumpulan PRAKARSA (PRAKARSA Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif) resmi berdiri. PRAKARSA dimaksudkan agar organisasi ini selalu menginisiasi tindakan-tindakan berbasis pengetahuan.